

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah semakin hari semakin baik, hal tersebut tercermin pada pemerintah yang menggalakan masyarakat pada peningkatan akses perbankan, terutama pada sektor keuangan mikro. Meskipun, secara *market share* keuangan syariah Indonesia masih relatif kecil, yakni hanya berkisar di angka 5%. (Budianto, 2018). Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS merupakan potensi yang bisa digerakkan dalam mendukung pergerakan ekonomi syariah di Indonesia.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 4 Jawa Timur menyampaikan bahwa total aset BPR Syariah di seluruh Jawa Timur pada akhir triwulan III/2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun. Jumlah itu setara dengan 6,37% dari total aset perbankan syariah di Jawa Timur. Dalam Evaluasi Kinerja BPR Syariah Se-Jatim pada 13/11/2017, Heru Cahyono menegaskan

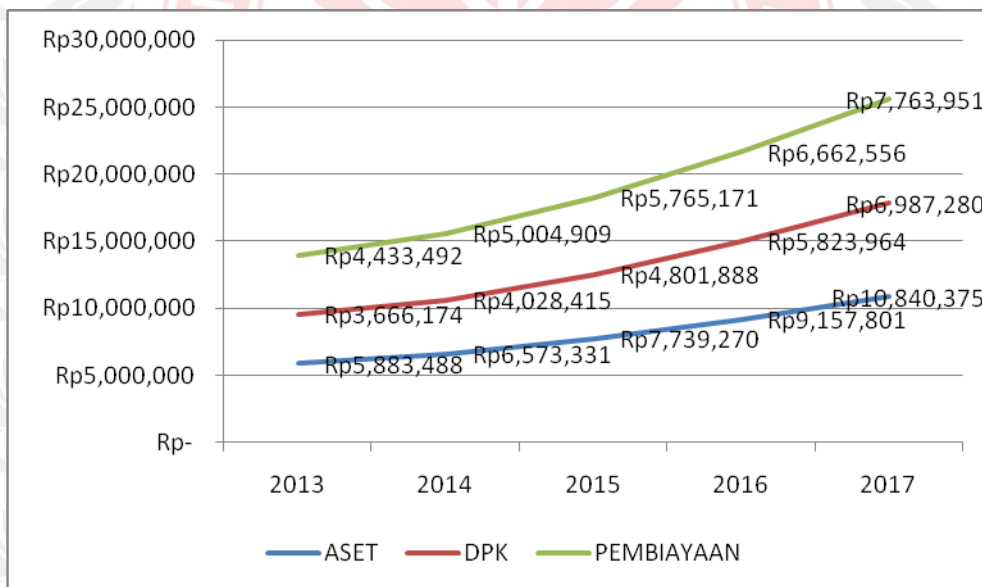
“Struktur DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dihimpun BPR Syariah di Jawa Timur relatif efisien, dengan komposisi dana mahal dalam bentuk deposito mencapai sebesar 53,86%, jumlah tersebut lebih kecil dibanding pangsa deposito pada BPR Konvensional di Jawa Timur yang mencapai 68,66%. Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan BPR Syariah merupakan pembiayaan produktif dengan pangsa mencapai 52,61%. Risiko kredit BPR Syariah cenderung meningkat pada triwulan III/2017 dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 10,00%, lebih tinggi dibanding rasio NPL BPR Konvensional yang sebesar 8,04%. BPR Syariah harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.” (Hakim, 2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan baik. Dari sisi perkembangan kelembagaan, menurut Statistik Perbankan Syariah jumlah BPR Syariah di Indonesia hingga bulan Juni 2018 berjumlah 168 Kantor. Sedangkan di wilayah Jawa Timur telah berdiri sebanyak 29 BPRS.

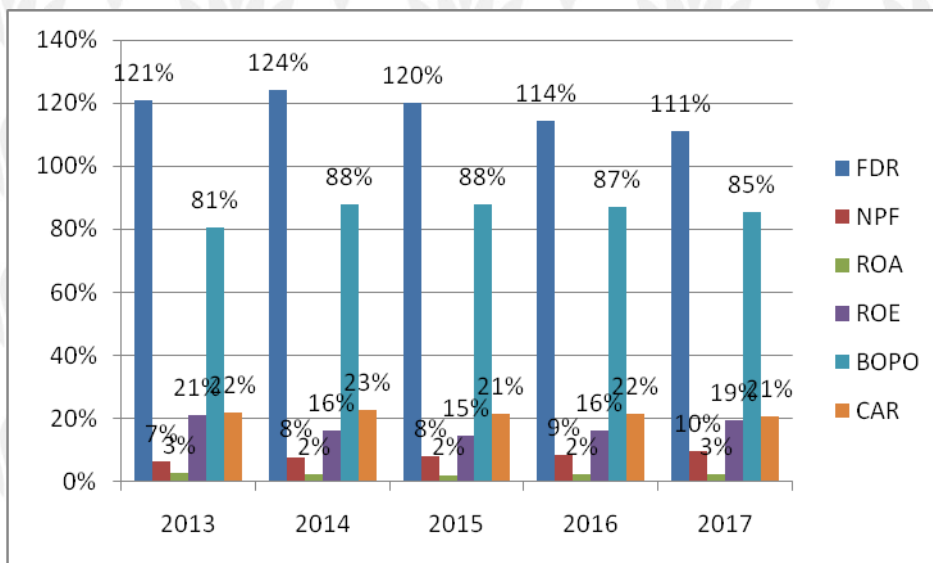


Gambar 1.1 Pertumbuhan BPRS di Indonesia
 Sumber : SPS Juni 2018 OJK
 (Data diolah, 2019).

Selain dilihat dari jumlah kantor, perkembangan BPR Syariah juga dapat dilihat dari beberapa indikator seperti aset, DPK, pembiayaan, FDR, NPF, ROA, ROE, BOPO, dan CAR.



Gambar 1.2 Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan BPRS di Indonesia
 Tahun 2013-2017
 Sumber : SPS Juni 2018 OJK (Data diolah, 2019).



Gambar 1.3
Perkembangan FDR, NPF, ROA, ROE, BOPO, CAR BPRS di Indonesia
Tahun 2013-2017

Sumber : SPS Juni 2018 OJK (Data diolah, 2019).

Dari grafik diatas dapat dijelaskan terjadi peningkatan pada aset, DPK dan pembiayaan BPR Syariah dari tahun ke tahun. Dari peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah hal ini juga diikuti dengan peningkatan NPF yang dimiliki oleh BPR Syariah. Hal ini membuktikan bahwa BPR syariah perlu menerapkan manajemen risiko kredit agar mencegah risiko pembiayaan BPR Syariah tidak melebihi dengan besarnya toleransi risiko kerdit yang telah ditetapkan oleh BPR Syariah.

Menurut POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BPRS harus sehat dan tangguh (*sustainable*). Melalui PBI No 13/1/PBI/2011, Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua bank untuk mengumumkan tingkat kesehatan.

Perbankan syariah merupakan subsistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan perbankan syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan (Dusuki, 2008 dalam Sudrajat dan Sodiq, 2016). Penilaian terhadap

perbankan syariah termasuk BPRS tidak hanya dapat diukur melalui kinerja keuangan dengan pengukuran konvensional, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis islami yang juga dapat diukur dari sisi sejauh mana menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan dengan baik (Siddiqi dalam Afrinaldi, 2012).

Penilaian tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam penelitian ini fokus menggunakan dua metode. Pertama, berdasarkan penilaian tingkat kesehatan POJK Nomor 8/03/2014. Cakupan penilaiannya menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) dengan faktor-faktor yang dinilai antara lain RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Government*, *Earnings* dan *Capital*. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis rasio keuangan yang terdapat di laporan keuangan triwulanan BPRS, antara lain *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA), *Net Operation Margin* (NOM), *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kedua, metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) yang menjadi alat ukur atau *framework* yang telah disesuaikan dengan konsep dan praktik perbankan syariah, yang diperkenalkan oleh Mohammed, dkk (2008). *Maqashid Syariah Index* (MSI) memiliki tiga nilai tujuan syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kemashlahatan. Perbandingan kedua metode tersebut dirasa cukup penting mengingat penilaian dilakukan bukan hanya dari segi konvensional namun juga dari segi syariah.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menilai kinerja BPRS menggunakan dua metode yang telah disesuaikan. Judul dari penulisan skripsi ini yaitu “**Analisis Integratif Kinerja BPRS di Jawa Timur Tahun 2013-2017 Berdasarkan *Risk Profile*, *Earnings*, *Capital* (REC) dan *Maqashid Syariah Index* (MSI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesehatan BPRS di Jawa Timur berdasarkan metode REC tahun 2013-2017 ?

2. Bagaimana tingkat kinerja BPRS di Jawa Timur berdasarkan metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) tahun 2013-2017?
3. Bagaimana klasifikasi kuadran BPRS di Jawa Timur tahun 2013-2017?
4. Bagaimana uji variabel dominan BPRS di Jawa Timur tahun 2013-2017 berdasarkan analisis diskriminan dari metode REC dan MSI?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kesehatan BPRS di Jawa Timur berdasarkan metode REC periode tahun 2013-2017.
2. Menganalisis tingkat kinerja BPRS di Jawa Timur metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) periode tahun 2013-2017.
3. Menganalisis klasifikasi kuadran BPRS di Jawa Timur tahun 2013-2017.
4. Menganalisis uji variabel dominan BPRS di Jawa Timur tahun 2013-2017 berdasarkan Analisis Diskriminan dari metode REC dan MSI.

1.4 Manfaat

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah pemahaman bidang ilmu manajemen keuangan perbankan syariah terutama mengenai pengukuran kesehatan BPRS yaitu menggunakan metode REC dan *Maqashid Syariah Index* (MSI).
 - 2) Menjadi sumber referensi bagi pengembangan penelitian sejenis dan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada maupun yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi akademisi:

- a) Penelitian ini bisa memberikan bukti empiris mengenai analisis kinerja pada BPRS khususnya dengan menggunakan dua model yaitu REC dan *Maqashid Syariah Index*.
- b) Menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat kesehatan BPRS dalam periode waktu tertentu berdasarkan metode yang digunakan.

2) Bagi manajemen perusahaan:

- a) Menjadi perbandingan manajemennya khususnya pada kinerja keuangan perusahaannya dengan kinerja keuangan perusahaan lainnya.
- b) Menjadi bahan masukan atau koreksi bagi pihak BPRS dalam meningkatkan kinerja sehingga mampu mempertahankan kondisi tingkat kesehatan BPRS pada peringkat yang baik.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Rasio kesehatan BPRS pada metode REC antara lain, NPF, FDR, ROA, ROE, NOM, dan BOPO. Sedangkan metode MSI sesuai model yang dibuat dan digunakan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib (2008).
2. Laporan keuangan publikasi triwulan BPRS periode Desember 2013 sampai Desember 2017.